

PENGARUH MOTIVASI DAN TATA KELOLA KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS RSAL DR. RAMELAN SURABAYA

Karolina Adit dan Mersiana Varia Juita

Program Studi Akuntansi STIE YAPAN Surabaya

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSAL Dr. Ramelan Surabaya. Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan kinerja instansi. Adanya reformasi dalam tata kelola pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit mengharuskan pengelola keuangan agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk pelaksanaan program kegiatan. hal yang paling mendasar adalah tidak tersedianya teknologi yang dapat mendukung kelancaran kerja. Teknologi yang telah usang, terutama teknologi informasi sehingga sulit untuk mendapatnya informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya, akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan RSAL. Dr. Ramelan Surabaya. Sampel dalam penelitian ini otoritas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan RSAL. Dr. Ramelan Surabaya Pembantu kepala rumah sakit, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Seksi, yaitu Bendahara Penerima, Bendahara Pengguna, PUMK, dan staf pengelola keuangan sebanyak 35 responden. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier Moderat.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan: 1. Variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr. Ramelan Surabaya. 2. Variabel Tata Kelola Keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr. Ramelan Surabaya.

Keyword : *Motivasi, Tata Kelola Keuangan, Pelaksanaan Akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan organisasi kompleks yang dalam berbagai aktivitasnya membutuhkan penanganan serius. Aktivitas jasa rumah sakit sangat terkait dengan hal berikut: pelayanan, keuangan, aturan, kepuasan pasien, manajemen, dan kondisi masyarakat. Sudah saatnya rumah sakit Indonesia bangkit dan harapan menjadi tuan rumah yang dihargai warganya dalam pelayanan kesehatan yang diawali dengan perencanaan anggaran. Masih banyak rumah sakit yang menganggarkan pelayanannya berbasis input dan sebagian lagi sudah ke arah indikator proses. Kini saatnya berubah menuju anggaran berbasis output atau produk yang mengandalkan kinerja. Bukan saatnya lagi berbasa-basi dengan nama berbasis kinerja, akan tetapi indikatornya masih input. Jika berbasis kinerja hanya indikator efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan rumah sakit merupakan tujuan utama dalam mengalokasikan sumber daya rumah sakit. Sulistiadi,(2016).

Dalam administrasi rumah sakit yang merupakan bagian dari sistem administrasi keuangan publik, sering kali berpeluang terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dari celah anggaran dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (diskresi).

Sulistiadi,(2016).Perencanaan anggaran dapat di *mark up*, disembunyikan pada item yang sangat banyak, alokasi yang tidak tepat dan yang lebih berbahaya lagi adalah tidak *matching*-nya tujuan pencapaian anggaran dengan jumlah nilai uang yang harus dianggarkan. Pimpinan rumah sakit atau penguasa anggaran pun dapat membuat suatu aturan yang mengamankan dirinya untuk mendapatkan fasilitas dan alokasi anggaran dari kewenangan dan kekuasaannya, inilah yang dikenal dengan diskresi. Dalam tulisan ini lebih memfokuskan kepada masalah anggaran.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang- Undang No. 17 tahun 2015 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, dan akuntabilitas - transparansi. Yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah.

Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Memang menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif dan tidak efisien. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan. Rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Kiswara dan Hendrawan,(2016). Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (*profesionalitas*) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. Kiswara dan Hendrawan,(2016).

Adanya reformasi dalam tata kelola pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan mengharuskan pengelola keuangan agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk pelaksanaan program/ kegiatan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) organisasi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas yang merupakan pondasi dari proses pemerintahan. Memberikan pelayanan yang baik, mengelola keuangan dengan baik dan mempertanggungjawabkan dana yang terhimpun merupakan perwujudan akuntabilitas pemerintahan. Jaya,(2017).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung- jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN – RI tahun 2015). Dengan adanya pelaksanaan akuntabilitas diharapkan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Keluarnya Undang-undang No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai pemeriksaan, telah mempunyai aturan yang jelas.Jaya ,(2017).

Tata Kelola Keuangan dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan PNPB fungsi manajemen meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pengawasan. Perwujudan Tata Kelola Keuangan didukung oleh adanya motivasi kerja dari aparatur yang mengelola keuangan. Menurut Siagian, (2014: 102) motivasi adalah daya pendorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi

keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Dengan pengertian, bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Hasibuan, 2015: 141). Motivasi dapat diciptakan dengan mengadakan pengaturan kerja yang baik, sehingga menimbulkan motivasi kerja bagi aparatur yang menyebabkan mereka mau mengerahkan kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya motivasi kerja dari aparatur tentunya Tata Kelola Keuangan akan dapat diwujudkan.

RSAL Dr. Ramelan Surabaya adalah rumah sakit negeri kelas I. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah ditetapkan sebagai rujukan tertinggi atau disebut pula sebagai rumah sakit pusat. Rumah Sakit ini Termasuk Besar Tempat ini tersedia 632 tempat tidur inap, lebih banyak dibanding setiap rumah sakit di Jawa Timur yang tersedia rata-rata 53 tempat tidur inap. Jumlah Dokter Tersedia Banyak Dengan 279 dokter, rumah sakit ini tersedia lebih banyak dibanding rata-rata rumah sakit di Jawa Timur. RSAL Dr. Ramelan Surabaya, (2015).

Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas manajemen pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSAL Dr. Ramelan Surabaya. Akuntabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja untuk meningkatkan keefektifan kinerja instansi pemerintah salah satu pertanggungjawaban yang diberikan di sini adalah pertanggungjawaban administratif yang memfokuskan pada pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan langsung kepada pimpinan atau badan yang lebih tinggi. Suparto dalam Ratminto (2015) bahwa Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan rumah sakit berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tata Kelola Keuangan dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan PNBPF fungsi manajemen meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pengawasan.

Kemudian ditambah lagi bahwa motivasi dalam RSAL Dr. Ramelan Surabaya mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Hasibuan, 2015:141). Motivasi dapat diciptakan dengan mengadakan pengaturan kerja yang baik, sehingga menimbulkan motivasi kerja bagi aparatur yang menyebabkan mereka mau mengerahkan kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya motivasi kerja dari aparatur tentunya Tata Kelola Keuangan akan dapat diwujudkan. Dari hasil observasi di RSAL Dr. Ramelan Surabaya motivasi kerja aparatur pengelola keuangan belum dapat meningkatkan atmosfer kerja yang produktif untuk peningkatan kinerja sesuai harapan. Menurut hasil evaluasi sistem tata kelola RSAL Dr. Ramelan Surabaya dalam buku Rencana Strategi (2017:8), manajemen sumber daya manusia belum mampu menciptakan atmosfer kerja yang produktif. Penghargaan atas prestasi kerja belum tersedia secara memadai, sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja sesuai harapan.

Jika penghargaan atas prestasi kerja belum tersedia secara memadai tentunya motivasi kerja aparatur pengelola keuangan tidak sepenuhnya dapat diharapkan sesuai keinginan. Hal ini akan mempengaruhi pada Tata Kelola Keuangan, dimana Tata Kelola Keuangan yang baik dapat terlaksana dengan diberikan pelatihan yang memadai dan penghargaan berupa finansial sehingga mendorong motivasi kerja aparatur untuk melaksanakan Tata Kelola Keuangan yang baik dan juga akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan RSAL Dr.

Ramelan Surabaya. Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang : ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTABILITAS DI RSAL DR. RAMELAN SURABAYA

Akuntansi Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun media pemberitahuan untuk publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam kegiatan pengendalian manajemen, mengukur kinerja, dan menyajikan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca (Mardiasmo, 2014).

Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis (Haryanto, 2016). Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Akuntansi Sektor Publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit lainnya (Indra, 2016).

Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh pemerintah agar dapat mengelola alokasi sumber daya secara tepat, efisien, serta ekonomis. Selain itu, akuntansi sektor publik juga menyajikan data yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan dana masyarakat. Dengan demikian, akuntansi sektor publik bertujuan menyediakan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas

Motivasi kerja

Kata motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin *movere*, kata dasarnya adalah motif (motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian Motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan (Nawawi, 2015). Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau dengan kata lain pendorong semangat kerja (Martoyo, 2016). Untuk menghindari kekurang tepatan menggunakan istilah motivasi perlu kiranya dikemukakan oleh Manullang dalam (Martoyo, 2016) tentang beberapa istilah yang mirip dengan pengertian dari :

1. Motif: motif disamakan artinya dengan kata-kata motif dorongan, serta alasan, yang dimaksud dengan motif adalah dorongan atau tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak.
2. Motivasi: motivasi atau motivation menimbulkan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang dapat menimbulkan dorongan. Dapat juga dikatakan bahwa motivation adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu.
3. Motivasi kerja: motivasi kerja bertolak dari arti motivasi tadi, maka yang dimaksud dengan motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau kata lain pendorong semangat.

Tata Kelola Keuangan

Manajemen keuangan secara umum merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur proses keuangan perusahaan baik dalam proses jual dan beli maupun kinerja perusahaan. Pengertian manajemen keuangan menurut Bambang Riyanto (2016:4) adalah : “Keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin”.

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage*, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola (Gomes, 2015). Dalam penerapannya manajemen memiliki beberapa fungsi. Pakar manajemen Schermerhorn (2015) membagi fungsi manajemen menjadi 4 yaitu : *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dari pendapat Schermerhorn (2015) tentang fungsi manajemen, maka dalam pemerintahan fungsi manajemen yang diterapkan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tata Kelola Keuangan dimaksudkan agar dalam pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan PNPB fungsi manajemen meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pengawasan.

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan atau rumah sakit, Sulistyowati, (2013).

Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan, dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan nilai rumah sakit. Sulistyowati, (2013). Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut empat (4) aspek yaitu:

1. Pertama, yaitu dalam perencanaan dan peramalan, dimana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan/rumah sakit.
2. Kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya.
3. Ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di dalamnya agar perusahaan/rumah sakit dapat beroperasi seefisien mungkin
4. Keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan/rumah sakit dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan/rumah sakit dapat diperdagangkan atau diberdayakan sebagai sumber asset

Akuntabilitas Keuangan Rumah Sakit

Menurut Stanbury (2015) dalam Mardiasmo (2016) akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan akuntabilitas oleh pengelola keuangan pada organisasi diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Akuntabilitas keuangan adalah salah satu upaya dalam pencatatan keuangan dari pencatatan keuangan manual menjadi suatu pencatatan yang sistematis dapat di baca dan analisa setiap orang. Dalam rumah sakit yang masih kecil pasien kunjungan pasiennya akuntabilitas ini dapat diterapkan secara manual dan sederhana, namun oleh karena peningkatan pelayanan yang juga berpengaruh kepada jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit, maka diperlukan akuntabilitas dengan menggunakan SIMRS yang terintegrasi guna menghasilkan laporan yang cepat, tepat, konsisten dan auditable. Simbolon, Dennis,(2016).

Hampir seluruh rumah sakit telah berupaya memenuhi kriteria akuntabilitas dan SIMRS, namun dalam pelaksanaannya masih menerapkan SIMRS secara manual. Dan yang sering terjadi rumah sakit hanya dapat memperhitungkan pendapatan RS, sementara biaya operasional yang sangat besar tidak dapat di deteksi oleh pihak rumah sakit. Sehingga hasil yang diperoleh belum sesuai dengan apa yang diharapkan pihak manajemen dan calon investor.

Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Rumah Sakit

Akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya (BPKP, 2016:4). Untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan aparatur pengelola keuangan perlu dimotivasi agar dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang telah dibebankan dan menjadi tanggungjawabnya. Aparatur yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan berupaya untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain motivasi kerja aparatur pengelola keuangan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Motivasi adalah keinginan bekerja untuk mencapai tujuan, dimana tujuan tersebut dapat mendorong para anggota untuk melakukan pekerjaan atau dapat mengakibatkan timbulnya mobilitas kerja. Indikator dari motivasi adalah kesungguhan dan keseriusan dalam melakukan pekerjaan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, atasan dan sesama anggota, ketabahan akan kejujuran dalam bekerja dan keuletan atau kekhawatiran jika mengalami kegagalan (Maryanto dkk, 2014: 4). Proses untuk memberikan motivasi tersebut harus dilakukan dengan cara yang kreatif agar memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam konteks organisasi publik, karyawan yang bekerja di rumah sakit lebih merupakan 'kepemimpinan formal' dalam arti pemimpin merupakan orang yang diangkat dan dikukuhkan untuk menduduki jabatan tertentu. Pada kondisi demikian, akuntabilitas (*accountability*) menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kedudukan dan kepemimpinan dan pertanggungjawaban sosial. Akuntabilitas di atas mengandung makna keharusan atau kemampuan untuk menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dan proses yang dilakukan serta mempertanggungjawabkan atas kinerjanya.

Widodo, Joko, (2016) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong karyawan atau pemangku wewenang untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi.

Pengaruh Tata Kelola Keuangan Terhadap Akuntabilitas Rumah Sakit

Pengelolaan keuangan negara pada sebuah organisasi diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP dan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila Tata Kelola Keuangan juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumber daya yang melaksanakan fungsi akuntansi sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena tanpa sumber daya yang mengerti akan proses akuntansi maka kualitas laporan keuangan perlu dipertanyakan (Sandra dan Arastyo : 2014).

Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan dari sumber daya manusia tersebut. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan motivasi kerja dari aparatur pengelola keuangan agar dapat melaksanakan Tata Kelola Keuangan yang baik, sehingga pelaksanaan akuntabilitas keuangan dapat terwujud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap Tata Kelola Keuangan yang juga berdampak pada pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Pengelolaan Tata Kelola Keuangan rumah sakit adalah suatu usaha dan kegiatan pengaturan uang yang meliputi kegiatan perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan dan pengawasan, pertanggung jawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan Tata Kelola Keuangan rumah sakit yang efisien, efektif, dan transparan akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya serta memberdayakan dan

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan. Mardiasmo, (2014;27)

Pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki kewajiban untuk mengawasi agar praktek pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo, (2014: 27) menjelaskan kaitan antara pengelolaan keuangan dengan akuntabilitas publik, sebagai berikut: "Pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *Value For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik". Dari teori tersebut jelas terlihat bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan atas dasar konsep *value for money* akan menciptakan akuntabilitas publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan Tata Kelola Keuangan adalah terciptanya akuntabilitas publik.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, landasan teori yang digunakan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya.
2. Bahwa Tata Kelola Keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan / individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto dan Subagyo, 2000: 107). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan RSAL. Dr.Ramelan Surabaya.

Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, karena itu sebuah sample harus merupakan representif dari sebuah populasi (Sumarsono, 2014 : 44). Dalam melakukan penarikan sample, digunakan metode *sensus Sampling* yaitu teknik penarikan sample dimana setiap anggota populasi dijadikan sampel yaitu Pembantu kepala rumah sakit, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Bendahara Penerima, Bendahara Pengguna, PUMK, dan staf pengelola keuangan sebanyak 35 responden.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menitikberatkan pada pengujian hipotesis, data yang dianalisis, sifatnya terukur dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan generalisasi. pengaruh moderasi dengan menggunakan model nilai selisih mutlak Ghozali (2014). Rumus persamaan regresi tersebut adalah:

$$a. Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	=	Akuntabilitas Keuangan
X ₁	=	Motivasi Kerja
X ₂	=	Tata Kelola Keuangan
β ₀	=	Konstanta.

β_1, β_2 = Koefisiensi regresi
e = variabel pengganggu

Uji Hipotesis

a. Kesesuaian model regresi linier berganda (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kecocokan pengaruh model variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun langkah – langkah tersebut :

- a. Merumuskan hipotesis
 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (Model regresi tidak cocok)
 $H_1 : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$ (Model regresi cocok)
- b. Menentukan level of signifikan (α) = 0,05
- c. Kriteria pengujian
 1. Jika tingkat signifikan (p – value) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 2. Jika tingkat signifikan (p – value) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji Parsial (t test)

Untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :

- a. Hipotesis:
 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat)
 $H_1 : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat)
 Dimana I = 1, 2, 3, 4
- b. Level of signifikan (α) = 0,05
- c. Kriteria Pengujian
 1. Jika tingkat signifikan (p – value) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 2. Jika tingkat signifikan (p – value) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Dimana dari hasil perhitungan yang menggunakan komputer dengan aplikasi program SPSS 22.00 (Statistical Program for Social Science) dibawah operasi windows.

Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.350	5.810		-.232	.818
	TX1	.855	.181	.604	4.720	.000
	TX2	.710	.259	.351	2.740	.010

a. Dependent Variable: TY

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
 $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

$$Y = -1,350 + 0,855X_1 + 0,710X_2 + e_i$$

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koefisien α :
Konstanta (α) sebesar -1.350 menunjukkan besarnya pengaruh motivasi kerja (X_1) dan pengelolaan Tata Kelola Keuangan (X_2), pelaksanaan akuntabilitas Keuangan RSAL Dr.Ramelan Surabaya (Y). Artinya apabila variabel bebas tersebut sama dengan nol, maka diprediksikan pelaksanaan akuntabilitas Keuangan (Y) sebesar -1.350 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
- b. Koefisien b_1 :
Koefisien regresi untuk motivasi kerja (X_1) sebesar 0,855 berarti jika motivasi kerja (X_1) naik satu-satuan, maka pelaksanaan akuntabilitas Keuangan RSAL Dr.Ramelan Surabaya (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,855 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
- c. Koefisien b_2 :
Koefisien regresi untuk pengelolaan Tata Kelola Keuangan (X_2) sebesar 0.710 berarti jika pengelolaan Tata Kelola Keuangan (X_2) naik satu – satuan, maka pelaksanaan akuntabilitas Keuangan RSAL Dr.Ramelan Surabaya (Y), akan mengalami kenaikan sebesar 0.710 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Uji Kecocokan Model

Untuk mengetahui cocok atau tidaknya alat analisa regresi yang digunakan dalam penelitian ini maka digunakan uji F. Dalam tabel berikut ini disajikan analisis Uji F.

Tabel 2. Hasil Analisis Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	279.478	2	139.739	14.553	.000 ^a
	Residual	307.265	32	9.602		
	Total	586.743	34			

a. Predictors: (Constant), TX2, TX1

b. Dependent Variable: TY

Sumber : data diolah

Terlihat dari angka F_{hitung} sebesar 14.553 dengan $Sig.0,000 < 0,05$ yang berarti signifikan, berarti secara bersama-sama perubahan variabel X_1, X_2 , mampu menjelaskan perubahan variabel Y . Hasil analisis ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk teknik analisis ini masih cocok, oleh karena itu untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk menggunakan model teknik analisis yang sama atau dengan menambahkan data penelitian.

Uji t (Uji Partial)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat maka dalam penelitian ini maka digunakan uji t. Sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.350	5.810		-.232	.818
	TX1	.855	.181	.604	4.720	.000
	TX2	.710	.259	.351	2.740	.010

a. Dependent Variable: TY

Sumb

er: data diolah

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari keseluruhan variabel motivasi (X1) dan Tata Kelola Keuangan (X2) nilai signifikansinya sebesar $< 0,05$ yang berarti signifikan, berarti secara partial perubahan variabel X_1, X_2 , mampu menjelaskan perubahan variabel Y. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk teknik analisis ini secara partial berpengaruh terhadap variabel pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya (Y).

Tabel 3 : Hasil Koefisien Determinasi (R^2 / R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.444	3.099

a. Predictors: (Constant), TX2, TX1

Sumber : data diolah

Dari hasil pengolahan data tabel diatas juga diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,476, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 47,6% pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja (X1), Tata Kelola Keuangan (X2), sedangkan sisanya sebesar (100-47,6=51,4%) dijelaskan oleh sebab – sebab lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dan besarnya koefisien korelasi berganda (R) = 0,690. Ini berarti besar hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah cukup tinggi yaitu sebesar 69%. *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 3,099 Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Uji Hipotesis

1. Variabel motivasi kerja (X_1) berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya (Y), dengan tingkat [Sig. 0,000 < 0,05].
2. Variabel Tata Kelola Keuangan (X_2) berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya (Y), dengan tingkat [Sig. 0,010 < 0,05].

Pembahasan Dan Implikasi Penelitian Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya

Variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya. Hal ini berarti motivasi kerja karyawan mendukung pelaksanaan akuntabilitas di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya dimana akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik

Penelitian ini juga didukung Jaya, Alfi (2017) menyatakan bahwa 1. Motivasi kerja dan Tata Kelola Keuangan secara total berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada Unsyiah. 2. Motivasi kerja berpengaruh terhadap Tata Kelola Keuangan pada Unsyiah. 3. Motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada Unsyiah. 4. Tata Kelola Keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada Unsyiah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya sebagai perwujudan pertanggungjawaban organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya (BPKP, 2016:4). Untuk melaksanakan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya perlu dimotivasi aparatur pengelolanya agar dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang telah dibebankan dan menjadi tanggungjawabnya. Aparatur yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan berupaya untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi rumah sakit.

Dengan diberikannya status sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang artinya bahwa RSAL. Dr.Ramelan Surabaya diberikan otonomi atau fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang atau jasa dan beberapa kebijakan lainnya yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perumusan kebijakan perencanaan pendapatan RSAL. Dr.Ramelan Surabaya dalam mengelola potensi pendapatan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan rasional. Kebijakan umum pengelolaan keuangan RSAL. Dr.Ramelan Surabaya diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada pasien yang berobat ke rumah sakit dan peningkatan sarana prasarana rumah sakit guna menunjang pelayanan rumah sakit serta penggunaan billing sistem rumah sakit. Oleh karena itu upaya keras untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada pasien harus dilakukan secara terus menerus yang dapat menjamin terealisasinya visi dan misi RSAL. Dr.Ramelan Surabaya. Pendapatan Rumah Sakit dirancang sesuai dengan belanja yang akan dilaksanakan oleh rumah sakit.

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan komitmen pimpinan. Untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan aparatur pengelola keuangan RSAL. Dr. Ramelan Surabaya perlu dimotivasi agar dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang telah dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya. Penghargaan atas prestasi kerja yang belum memadai bagi aparatur pengelola keuangan pada RSAL. Dr.Ramelan Surabaya dapat mempengaruhi capaian kinerja sesuai harapan. Hal ini akan meningkatkan motivasi kerja aparatur dalam melaksanakan pengelola keuangan yang berdampak pada pelaksanaan akuntabilitas keuangan yang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu atasan perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan motivasi kerja bagi bawahan agar

dapat bekerja secara produktif sehingga berdampak pada pelaksanaan akuntabilitas keuangan yang baik. Aparatur yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan berupaya untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain motivasi kerja aparatur pengelola keuangan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Faktor pendukung untuk terciptanya manajemen kinerja yang baik diperlukan juga komitmen dan motivasi yang dimiliki oleh setiap individu. Komitmen dan motivasi tersebut dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitaspun sangat diperlukan sebagai pertanggungjawaban kinerja setiap individu tersebut.

Pengaruh Tata Kelola Keuangan Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya

Variabel Tata Kelola Keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya. Hal ini berarti Tata Kelola Keuangan di dalam RSAL. Dr.Ramelan Surabaya sudah berlangsung secara baik, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan akuntabilitas di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya.

Penelitian ini juga didukung oleh Nahar Dan Siti (2016) menyatakan bahwa 1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada RSAL. Dr.Ramelan Surabaya Tata Kelola Keuangan sudah lama diterapkan namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut hasil evaluasi sistem tata kelola RSAL. Dr.Ramelan Surabaya dalam buku Rencana Strategi manajemen keuangan belum memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebabkan karena masih terkendala dengan sistem manajemen keuangan yang berlaku saat ini. Perencanaan dan pengelolaan keuangan masih tergantung pada dana yang tersedia dan belum berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan pada RSAL. Dr.Ramelan Surabaya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila Tata Kelola Keuangan juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tata Kelola Keuangan yang belum didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku terutama dalam pencairan dana yang harus dilaksanakan secara cepat dan tepat serta belum terkontrolnya dana secara keseluruhan, agar menjadi bahan pertimbangan bagi atasan pada periode selanjutnya, sehingga pengelolaan keuangan dapat memenuhi harapan dalam pencapaian kinerja. Tata Kelola Keuangan yang baik akan berpengaruh pada pelaksanaan akuntabilitas keuangan yang baik pula. Tata Kelola Keuangan pada RSAL. Dr.Ramelan Surabaya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SAP dan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata Kelola Keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar dapat mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas yang baik dalam proses pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan di bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya.
2. Variabel Tata Kelola Keuangan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas Keuangan di RSAL. Dr.Ramelan Surabaya.

Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan perlu memberikan pemahaman kepada responden dalam mengisi kuesioner sehingga teknik analisis yang di gunakan dapat sesuai.
2. Dalam peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan responden dapat diperluas pada setiap entitas yang melaksanakan Tata Kelola Keuangan.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel bebas lainnya yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan selain variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara Kadarisman, M. 2012. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan pertama, Rajawali Press, Jakarta
- Artjana 2014, *Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance Tantangan dan Harapan*, <http://www.go.id>. down load tanggal 6 April 2008.
- BPKP 2017, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi Keempat. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2005, Peraturan Nomor : 02/PB/2005, *Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Pendapatan Dan Belanja Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Effendi 2016, *Kendala dalam Penerapan Ketentuan dalam PNPB dan Penetapan Aset Tetap Universitas Gajah Mada*. [sofian.staff.ugm.ac.id/---/kendala-dalam-penerapan- PNPB.pdf](http://sofian.staff.ugm.ac.id/---/kendala-dalam-penerapan-PNPB.pdf).
- Gitosudarmo, Indriyo, 2014. *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul, Muhammad Iqbal., 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Handoko, Martin 1992, *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*. Yogyakarta :
- Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Teori Akuntansi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi
- Kanisius. Islamy, Irfan 2016, *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 1, September 2016 : 13-30*.
- Kementerian Pendidikan Nasional 2010, *Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendiknas*.
- Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan 2016, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- LAN RI 2003, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Mardiasmo 2016, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2 No.1 Mei 2016 : halaman 1-17*.

- Sandra, Ria dan Fidelis Arastyo 2014, Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah XYZ Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat, *JAKSP*, Vol.05, N0.02, Agustus 2014.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Scermerhorn 2005, *Management*, 8th Edition, New York : John Wiley and Sons.
- STAN 2017, *Dasar-Dasar Audit Internal Sektor Publik*, Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjandra riawan 2013: *Hukum keuangan Negara PT*. Grasindo , 2013, Jakarta
- Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.,
- Undang No. 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*, Bandung : Fokusmedia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, *Perbendaharaan Negara*, Bandung : Fokusmedia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, *Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2014, *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*, Lembaran Negara RI.